

**Judul** : Polemik pembayaran royalti musik di tempat usaha jadi sorotan  
**Tanggal** : Minggu, 10 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Polemik Pembayaran Royalti Musik Di Tempat Usaha Jadi Sorotan

Polemik royalti musik yang diwajibkan di tempat usaha kembali mencuat. Peraturan yang mengharuskan para pelaku usaha membayar royalti atas musik yang diputar di tempat usaha dinilai tidak adil.

Sebelumnya, ramai diberitakan restoran PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan) dikenakan tarif royalti atas penggunaan lagu atau pemutaran musik. Namun akhirnya Mie Gacoan sepakat untuk membayar royalti Rp 2,2 miliar kepada Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi). Jumlah tersebut untuk royalti penggunaan lagu atau musik selama periode 2022 hingga akhir Desember 2025.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani buka-bukaan soal persoalan ini. Haryadi mendesak revisi aturan dan evaluasi ulang tarif royalti yang dianggap mencekik para pengusaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Undang-undangnya harus diubah, tarifnya ditinjau ulang,

dan platform digital harus segera disosialisasikan," ujar Haryadi kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (9/8/2025).

Di sisi lain, sepuluh komisioner LMKN periode 2025 - 2028 baru saja dilantik di gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta, Jumat (8/8/2025). Para Komisioner LMKN yang baru dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai profesional hingga musisi.

Para komisioner LMKN setidaknya akan membidangi dua hal yakni Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait. Berikut sepuluh komisioner tersebut.

Untuk komisioner LMKN Pencipta : Andi Mulhanan Tombolotutu, M. Noor Korompot, Dedy kurniadi, Makki Usman, Aji M. Mirza Ferdinand. Untuk komisioner LMKN Hak Terkait : William, Ahmad Ali Fahmi, Suyud Margono, Jusak Irwan Setiono dan Marcell Siahaan.

Lantas, apa solusi dari polemik ini? Apakah perlu adanya revisi aturan royalti? Lalu, dengan adanya pelantikan komisioner LMKN yang baru, polemik masalah royalti ini akan selesai?

Anggota Komisi VII DPR Banyu Biru Djarot, yang juga anak dari pencipta lagu ternama Eros Djarot menegaskan pentingnya duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari jalan tengah. Menurut dia transparansi tata kelola dan edukasi publik menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman dan beban berlebihan bagi pelaku usaha.

"Hulu-hilirnya harus disepakati dulu oleh seluruh stakeholders. Setelah itu, meaningful participation dihidupkan, sehingga masukan semua pihak terdengar," ujar Banyu Biru kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (9/8/2025).

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Haryadi Sukamdani dan Banyu Biru Djarot.

### BANYU BIRU DJAROT

Anggota Komisi VII DPR

## Harus Duduk Bareng, Karena Terkait Ekosistem



“Jangan sampai yang tidak paham justru terkena sanksi hukum. Akses informasi saja sudah membingungkan. Saya bicara ini sebagai anggota DPR RI sekaligus anak seniman.

**Menurut Anda, apa masalah utama dari polemik royalti musik ini?**

Setahu saya, di regulasinya sebenarnya ada poin negosiasi. Contohnya, tarif per kursi dikalikan dengan rata-rata okupansi dari kursi tersebut. Artinya, apresiasi terhadap hak cipta baik karya para musisi maupun penciptanya sudah tentu harus ada. Masalah utamanya adalah hulu ke hilir dari LMKN harus dibenahi. Perlu ada edukasi masif ke publik, karena informasi yang beredar saat ini masih setengah-setengah dan simpang siur.

**Bisa Anda jelaskan latar belakang polemik ini mencuat?**

Awalnya ini karena ada trigger factor yang, Alhamdulillah, sudah beres, yaitu Kasus Mie Gacoan. Karena viral, ada potensi pidana, dan akhirnya Pak Menteri turun langsung mendampingi hingga ditempuh jalan keluar.

**Apa solusi yang Anda tawarkan?**

Ke depan akan lebih baik kalau tata kelolanya dipastikan dulu dan diputuskan bersama seluruh stakeholders.

**Harus duduk bersama karena ini menyangkut ekosistem yang tidak bisa dihilang dari satu sisi saja. Setelah ada kesepakatan poin demi poin, barulah dilakukan edukasi publik.**

**Karena edukasi publik dianggap penting?**

Ya karena banyak yang tidak tahu. Jangan sampai yang tidak paham justru terkena sanksi hukum. Akses informasi saja sudah membingungkan. Saya bicara ini sebagai anggota DPR RI sekaligus anak seniman. Bapaknya saya pencipta lagu, saya juga pernah mencipta lagu dan main band.

**Apakah ada kendala komunikasi selama ini?**

Ya, ada communication gap, gap ekspektasi, dan gap pengetahuan. Selama ini belum direduksi atau dimitigasi, akibatnya luar biasa. Kalau menyentuh dari PHRI sampai musisi di angkringan. Bahkan ada yang sekedar pasang radio di angkringan, tapi tiba-tiba dipermalukan.

**Bagaimana dengan UMKM?**

UMKM juga kena dampaknya. Mulai dari kafe kecil, pengamen, hingga tempat nongkrong di pinggir jalan. Perhatian juga masih banyak, misalnya kalau sudah bayar Spotify Premium atau YouTube Premium, apakah tetap harus bayar royalti? Itu belum jelas.

**Apa langkah ideal sebelum membuat aturan baru?**

Hulu-hilirnya harus disepakati dulu oleh seluruh stakeholders. Setelah itu, meaningful participation dihidupkan, sehingga masukan semua pihak terdengar. Transparansi tata kelola juga harus dijamin sebelum aturan dibuat, baru kemudian edukasi publik dilakukan secara masif.

**Karena harus masif?**

Karena ini menyangkut semua lapisan, dari hotel bintang lima sampai angkringan, dari musisi profesional sampai pengamen keliling. Semuanya terdampak. Prinsipnya, kita semua setuju apresiasi terhadap karya itu penting, tapi pelaksanaan-nya harus adil. **BNM**

### HARYADI SUKAMDANI, Ketua

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

## Aturan Royalti Bisa Mencekik Pelaku Usaha



“Saya berharap Pemerintah mau mendengarkan kami. Undang-undangnya harus diubah, tarifnya ditinjau ulang, dan platform digital harus segera disosialisasikan.

**Menurut Anda, apa masalah utama terkait polemik royalti musik yang berlaku saat ini?**

Aturan yang ada memang harus ditinjau karena undang-undangnya mengatur semua lagu yang diputar di publik dianggap komersial dan harus bayar. Makanya, banyak orang bertanya dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selalu menjawabnya berbeda-beda.

Contohnya, saat ditanya apakah lagu Indonesia dikenai royalti, mereka bilang tetap bayar. Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak paham. Jadi, ada dua masalah utama. Pertama regulasi harus direvisi dan pengurus LMKN banyak yang tidak paham.

**Apa yang perlu dibenahi dari regulasi yang ada?**

Regulasi harus dibenahi dari pengertian "komersial" itu sendiri. Lalu, bagaimana jika penyanyi atau pencipta lagu tidak ingin ditarik royalti, seperti Rhoma Irama yang membolehkan lagunya diputar gratis. Mekanisme untuk hal ini tidak diatur

dengan jelas. Mereka tetap bilang harus bayar. Masalahnya adalah, cara mengumpulkan dan mendistribusikan royalti di aturan lama sudah tidak relevan karena sekarang sudah era digital.

**Kalau untuk tarif royalti, apa menjadi masalah?**

Ya, tarifnya sangat mahal. Rp 125 ribu rupiah per kursi per tahun. Coba bayangkan jika ada restoran dengan 100 kursi, itu bisa mencapai 12 juta rupiah setahun. Ini tidak masuk akal.

**Anda berharap tarif ini bisa diturunkan?**

Betul. Kami berharap tarif bisa diturunkan jika menggunakan platform digital. Dengan platform digital, volume pembayaran bisa lebih besar sehingga harganya bisa lebih murah. Distribusinya pun menjadi lebih jelas dan teratur.

**Apakah ada masalah lain yang Anda temukan?**

Pola-pola dalam regulasi lama digunakan oleh pengurus lama LMKN

untuk menekan satu-sisi, bahkan sampai membareng polisi. Kenyataan di lapangan berbeda dari yang mereka sampaikan. Selain itu, mengenai sanksi, ini juga salah. Aturan yang lama menyebarkan sanksi pidana, padahal seharusnya perdata. Hal ini yang selama ini dimainkan dan akan kami luruskan.

**Apakah Anda memiliki harapan kepada pengurus yang baru?**

Kami akan berbicara dengan pengurus baru dan juga meminta agar undang-undangnya diubah. Kami berharap ada jalan tengah untuk masalah ini.

**Terkait platform digital, apakah sudah ada upaya untuk mengukurnya?**

Selenggaranya sudah ada investor yang membuat platform digital semacam Spotify buatan anak bangsa. Namun, platform ini tidak disosialisasikan. Kami tidak tahu apa alasannya. Hal lain yang menjadi tuntutan adalah biaya aplikasi harus sudah termasuk dalam tarif. **BNM**